

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

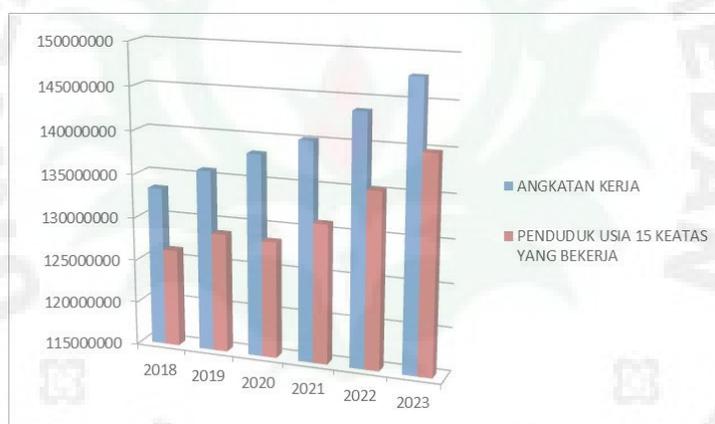
Setiap negara tentu menginginkan pertumbuhan ekonomi, begitupun Indonesia, yang berusaha untuk meningkatkan ekonominya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik, pembangunan yang optimal dengan mengembangkan potensi sumber daya alam dan manusianya diperlukan. Ini penting karena Indonesia adalah negara dengan banyak kepulauan. Menurut (Tahir, 2018) Penduduk yang banyak akan menjadi potensi jika mereka dapat memaksimalkan pemanfaatannya. Sebaliknya, populasi yang luas tersebut akan sangat menguntungkan para produsen karena mereka dapat mempertahankan stabilitas pasar. Hal ini tentu dapat dicapai jika setiap warga memiliki sumber penghasilan.

Untuk mencapai pemerataan pendapatan, penyerapan tenaga kerja sangat penting. Akibatnya, program-program berbasis perekonomian harus berkembang dan tumbuh secara aktif untuk mengimbangi peningkatan usia kerja. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan lapangan kerja yang dapat mengikuti pertumbuhan angkatan kerja, yang dapat menekan lonjakan pengangguran setiap tahunnya. Ketenagakerjaan sekarang menjadi masalah yang dihadapi di seluruh dunia, termasuk di negara berkembang, seperti Indonesia. Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat, yang menghasilkan jumlah input tenaga kerja yang besar. Dalam negara maju, masalah tenaga kerja biasanya terjadi ketika peran manusia digantikan oleh mesin dalam proses produksi. Namun, di negara

berkembang, seperti Indonesia, masalah tenaga kerja adalah pengurangan peran manusia dalam proses produksi.

Berikut grafik dari Jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja di Indonesia pada tahun 2018-2023,

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja 2018-2023**



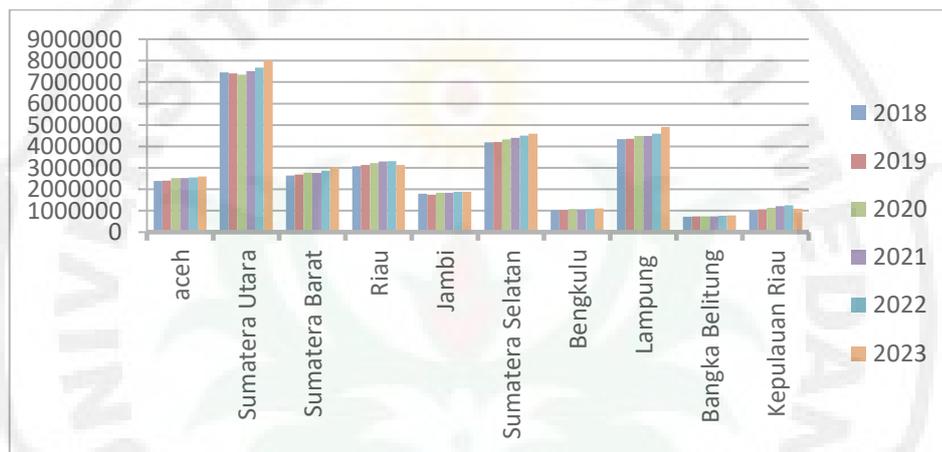
*Sumber : Badan Pusat Statistik*

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah angkatan kerja Indonesia yang beriringan dengan peningkatan penduduk yang bekerja. Penduduk yang terus bertambah dapat menjadi pendorong atau justru menghambat pertumbuhan ekonomi apabila para angkatan kerja tidak cukup terserap oleh kesempatan kerja yang ada (Bayu & Darsana, 2020). Maka peningkatan jumlah penduduk di sebuah negara harus diiringi oleh perluasan kesempatan kerja karena jumlah tenaga kerja yang besar dapat meningkatkan produktivitas. Permasalahan masih berfluktuasinya penyerapan tenaga kerja dan masih tingginya angka pengangguran pada tingkat provinsi di Indonesia juga

belum sepenuhnya berhasil, banyak provinsi di Indonesia mengalami hal serupa salah satunya di Provinsi Sumatera Barat.

**Gambar 1.2**

**Jumlah Angkatan Kerja di Pulau Sumatera tahun 2018-2023**



*Sumber : Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan gambar 1.2 terlihat bahwa dari tahun 2018 hingga 2023 Jumlah angkatan kerja di Pulau Sumatera berfluktuasi, dengan kenaikan terbesar terjadi di tahun 2023. Adapun jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Barat sebesar 3.134.788 jiwa, berada pada urutan ke lima tertinggi setelah Kepulauan Riau.

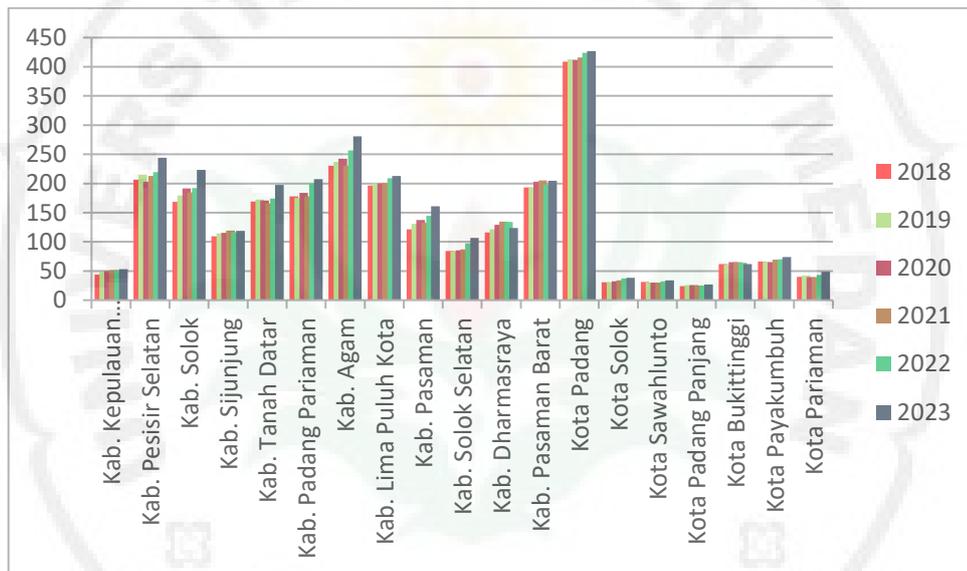
Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam produksi serta distribusi barang dan jasa. Ketika proses produksi serta distribusi dilakukan maka harus ada tenaga kerja. Tenaga kerja juga merupakan sasaran untuk menghidupkan dan mengembangkan pasar. Dengan begitu memungkinkan dengan berlangsungnya pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Sumatera Barat salah satu modal utama dalam pembangunan ekonomi adalah tenaga kerja.

Teori klasik menurut Adam Smith yaitu kekayaan didalam suatu negara akan bertambah sesuai dengan keterampilan tenaga kerja yang digunakan. Sumber utama pendapatan adalah produksi dari hasil tenaga kerja dan sumber daya ekonomi. Tingkat output dan harga keseimbangan hanya bisa dicapai kalau perekonomian berada pada tingkat penyerapan tenaga kerja penuh. menurut Mulyadi, teori klasik menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Hal ini sesuai dengan teori klasik Adam Smith (1729-1790) bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tetap tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan penduduk yang sangat besar setiap tahun tentu berdampak pada bertambahnya jumlah angkatan kerja dan tentunya akan memberikan makna bahwa jumlah orang yang mencari pekerjaan akan meningkat, seiring dengan itu tenaga kerja juga akan bertambah. Masalah yang dihadapi ketenagakerjaan adalah jumlah penduduk yang bertambah tiap tahun. Jumlah penduduk usia produktif yang besar mampu meningkatkan jumlah angkatan. Tingginya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai akan menyebabkan pengangguran. Peningkatan jumlah lapangan kerja dan jenis

peluang kerja bagi masyarakat daerah merupakan tujuan utama dalam setiap pembangunan ekonomi (Panjawa & Soebagiyo, 2014).

**Gambar 1.3**  
**Angkatan Kerja yang Bekerja di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2018-2023 (Jiwa)**



Sumber: Badan Pusat Statistik

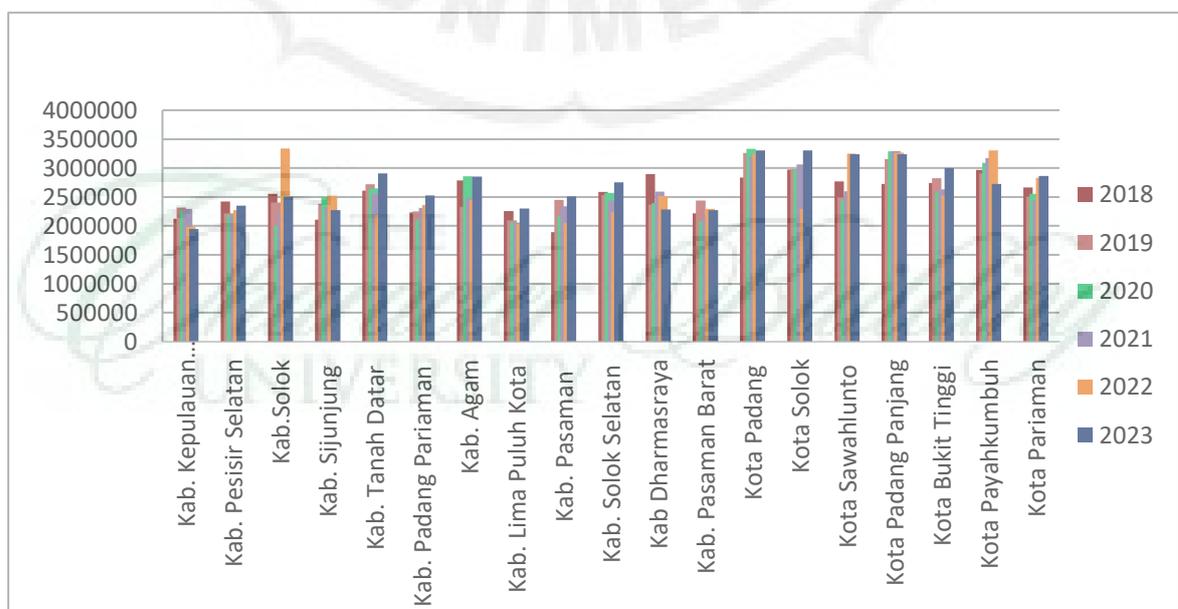
Dari gambar 1.3 menggambarkan mengenai angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat berfluktuasi. Angkatan kerja di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman menurun pada tahun 2020 dimana merupakan salah satu tahun berdampak Covid-19. Kabupaten/Kota yang memiliki angkatan kerja tertinggi ada di Kota Padang pada tahun 2023 yaitu 426.765 jiwa dan jumlah tenaga kerja terendah yaitu beradapada Kota Padang Panjang yaitu 23.954 jiwa pada tahun 2018. Fluktuasi ini disebabkan oleh salah satu faktor dalam perekonomian yaitu kondisi sumber

daya manusia yang rendah, disertai dengan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah. Dengan melihat fakta dan kondisi yang ada tentu ini menjadi masalah yang harus diatasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kuantitas masyarakatnya untuk bekerja, agar jumlah pengangguran dapat ditanggulangi.

Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Produk Domestik Regional Bruto, Upah, dan Indeks Pembangunan Manusia (Azzahra, 2023). Upah minimum dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dengan kondisi upah minimum di setiap daerah yang tentunya berbeda karena ditentukan oleh berbagai faktor termasuk kualitas sumber daya produktivitasnya.

**Gambar 1.4**

**Upah Minimum Kabupaten/Kota Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi

Pada Gambar 1.4 menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2023 berfluktuasi. Upah minimum di Kab. Solok pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp.3.339.847 lalu menurun pada tahun 2023 menjadi 2.505.907, berfluktuasinya upah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu inflasi, serta faktor eksternal seperti krisis ekonomi dan pandemi. Upah minimum tertinggi berada di Kota Solok sebesar Rp.3.306.210 pada tahun 2023 dan upah minimum terendah berada di Kab. Kepulauan Mentawai sebesar Rp.1.950.304 pada tahun 2023.

Ehrenberg (2002) menyatakan apabila terdapat kenaikan tingkat upah rata-rata maka akan diikuti turunnya jumlah tenaga kerja yang diminta, berarti akan terjadi pengangguran. Sebaliknya, dengan turunnya tingkat upah rata-rata akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan dengan tingkat upah.

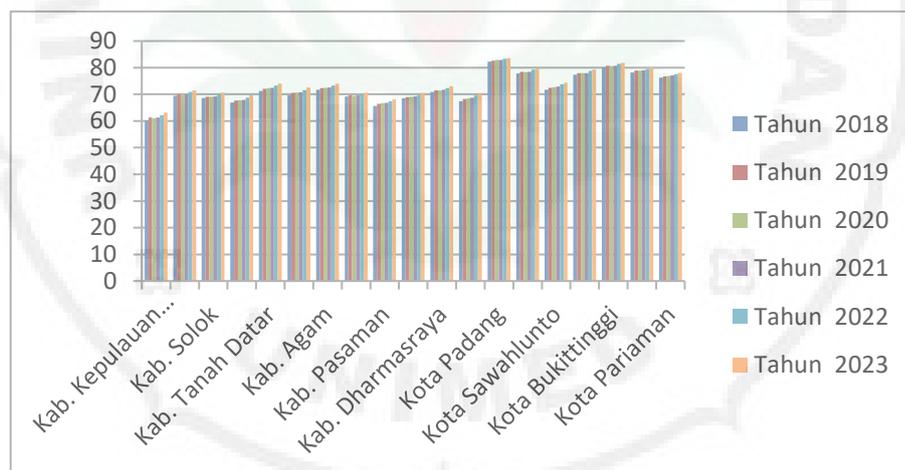
Pernyataan di atas juga didukung oleh penelitian terlebih dahulu yang diteliti oleh Desy Meilasari (2020) dalam judul Pengaruh UMP, PDRB dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa ditemukan hasil penelitian menunjukkan bahwa UMP berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Sehingga hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ehrenberg (2002).

Dalam konteks pembangunan ekonomi suatu daerah, penyerapan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki daerah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah meliputi pengelolaan sumber daya alam

(SDA) dan SDM. Pemerintah daerah dan masyarakatnya bekerja sama untuk mengelola sumber daya yang ada dan menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong peningkatan produktivitas barang dan jasa yang akan dihasilkan, oleh sebab itu semakin tinggi IPM akan mempengaruhi tenaga kerja dalam mencari mencari pekerjaan(Hafiz & Haryatiningsih, 2021).

**Gambar 1.5**

**IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023**



*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Pada gambar 1.5 menjelaskan indeks pembangunan manusia kabupaten dan kota di Sumatera Barat tahun 2018 hingga tahun 2023. Tingkat IPM antar kabupaten dan kota tiap tahunnya meningkat, pada umumnya di kota lebih tinggi IPM dari pada di kabupaten. Indeks pembangunan manusia kabupaten kota tertinggi terdapat pada kota padang yaitu 83,58%. Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera barat dimana banyak faktor yang menyebabkan IPM di Kota Padang tinggi, salah satu faktor yang membuat IPM kota padang tinggi yaitu

sektor pendidikan, di Kota Padang banyak terdapat sekolah maupun perguruan tinggi yang bagus dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain. IPM terendah terdapat pada Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 60,26%, kabupaten ini merupakan satu-satunya kabupaten yang berbatasan laut dengan kabupaten dan kota lainnya. Dengan adanya jarak yang cukup jauh antar kabupaten dan kota, kabupaten mentawai cukup ketinggalan dibidang ekonomi, sosial, dan politik. Ada tiga indikator IPM yaitu harapan lama sekolah, angka harapan hidup dan pengeluaran perkapita. Yang paling berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat yaitu harapan lama sekolah.

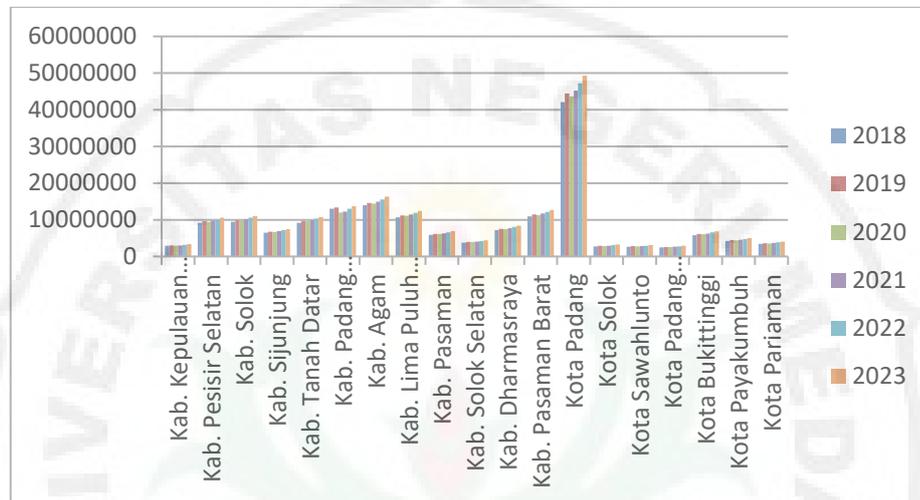
Menurut BPS tingkat IPM  $< 60$  tergolong dalam kategori rendah. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa tingkat Indeks Pembangunan Manusia tergolong tinggi. Daerah dengan IPM tinggi biasanya memiliki sumber daya manusia yang lebih terampil dan berkualitas. Tingginya kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pembangunan kapasitas SDM lainnya akan mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih besar di berbagai sektor ekonomi. Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Seperti dalam teori manusia modal (human capital theory) yang dikembangkan oleh (Becker, 1964) dan (Schultz, 1961) menyatakan IPM berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja bahwa balikan dari pendidikan dan kesehatan manusia dapat meningkatkan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi.

Pernyataan diatas juga didukung oleh penelitian terlebih dahulu yang diteliti oleh Dalam penelitian (Qotrunnadda, 2019) yang berjudul Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik regional Bruto dan Upah Minimum terhadap Pemyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2018. didapatkan hasil bahwa IPM berpengaruh positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa pada tahun 2010-2018. Sehingga penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Becker, 1964) dan (Schultz, 1961).

Dalam upaya untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan, pemerintah memberikan perhatian lain terhadap suatu hal yaitu PDRB, yang merupakan jumlah dari nilai tambah bruto yang diciptakan oleh semua sektor ekonomi di suatu daerah. PDRB dapat mempengaruhi jumlah dari angkatan kerja untuk bekerja. Hal ini dapat terjadi apabila diasumsikan nilai PDRB meningkat, sehingga dapat diartikan bahwa terjadinya peningkatan terhadap nilai output penjualan dari berbagai unit sektor perekonomian disuatu wilayah. Semakin tinggi jumlah penjualan, maka perusahaan akan berusaha untuk merekrut tenaga kerja agar mampu mengiringi jumlah produksi yang meningkat dikarenakan penjualan yang meningkat.

Gambar 1.6

## PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Pusat statistik

Gambar 1.6 merupakan data PDRB kabupaten dan kota di Sumatera Barat. PDRB perkapita Sumatera Barat dari 19 kabupaten kota dapat dilihat PDRB perkapita paling tinggi berada pada Kota Padang yaitu Rp.79.704.673,230 pada tahun 2023, kemudian PDRB per kapita paling terendah pada Kota Padang Panjang yaitu Rp.3.198.031,980 pada tahun 2018.

Penyebab adanya perbedaan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto tiap wilayah yaitu karena setiap daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda, keadaan wilayah serta sasaran kebijakan pembangunan yang tidak sama. Para pakar ekonomi mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan kinerja pembangunan daerah itu sendiri. Pemerintah suatu wilayah baik negara, provinsi, kota dan kabupaten perlu bersinergi guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi. Selain berguna untuk mengukur kinerja pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dijadikan suatu indikator guna penyusunan rencana pembangunan yang berkaitan dengan upaya penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi, peningkatan perdagangan yang diperlukan secara terus menerus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial.

Menurut Habiburrahman (2012), kenaikan PDRB mempunyai kemampuan yang besar dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja serta mampu menunjukkan lapangan kerja/kesempatan kerja yang lebih luas. Kemudian berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan teori Keynes, menyatakan bahwa pasar tenaga kerja mengikuti apa yang terjadi di pasar barang

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti perlu mengkaji tentang munculnya faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Dari faktor tersebut seperti Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka penulis memilih judul **“Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Barat”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Terjadi ketidakseimbangan antarpeningkatan angkatan kerja dengan permintaan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
2. Tidak meratanya pembagian upah di beberapa daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Indeks Pembangunan Manusia meningkat setiap tahun, ini menggambarkan pembangunan kualitas hidup yang cukup baik, keadaan ini dapat membawa perubahan terhadap penyerapan tenaga kerja lebih baik, namun beberapa wilayah berdampak sebaliknya
4. PDRB di beberapa wilayah mengalami perlambatan dan tidak merata

## 1.3 Pembatasan Masalah

Agar peneitian lebih terfokus dan tidak terlalu melebar, maka peneliti membuat pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Objek penelitian adalah 19 di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
2. Penelitian ini mengangkat variabel dependen yaitu Penyerapan Tenaga kerja tahun 2018-2023
3. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota, Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto pada tahun 2018-2023

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah terdapat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat?
3. Apakah terdapat pengaruh PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat?
4. Apakah terdapat pengaruh secara bersamaan UMK, IPM dan PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

4. Untuk mengetahui pengaruh secara bersamaan UMK, IPM dan PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

### 1.6 Manfaat Penelitian

#### 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta membantu mengembangkan dan mengaplikasikan teori tentang upah minimum, indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi tentang hubungan antar variabel, serta dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian lain.

#### 2) Manfaat Praktis

- a. peneliti mengharapkan agar kiranya hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi diri sendiri dalam mengembangkan, menambah dan memperluas ilmu pengetahuan.
- b. Untuk membantu pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan lembaga terkait dalam mengembangkan kebijakan penyerapan tenaga kerja.
- c. Untuk peneliti berikutnya, dapat digunakan sebagai sumber dan referensi.